

Peran KPU Kabupaten Sorong Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Guna Menyongsong Pemilu 2024

¹Muh Alif Weul Artafela, ²Roni Andri Pramita, ³Lestari

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

¹alifmuh@gmail.com, ²roniandripramita@unimudasorong.ac.id, ³lestari@unimudasorong.ac.id

Abstrak: KPU Kabupaten Sorong selaku penyelenggara pemilu di Kabupaten Sorong memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di tingkat daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula Guna Menyongsong Pemilu 2024. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini KPU Kabupaten Sorong dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik melalui dua cara yaitu dengan sosialisasi melalui berbagai media dan dengan pendidikan politik agar bertujuan meminimalisir angka golput di kalangan pemilih pemula.

Kata kunci: Pendidikan Politik, Pemilih Pemula, Pemilu

Abstract: *The Sorong Regency KPU as the election organizer in Sorong Regency has the task and function to support the implementation of quality elections at the regional level. The purpose of this study is to determine the role of the KPU in implementing political education for new voters in order to welcome the 2024 Election. The type of research used in this study is a descriptive type of research with a qualitative approach. The results of this study are that the Sorong Regency KPU in carrying out its political socialization function in two ways, namely by socializing through various media and with political education in order to minimize the number of abstentions among new voters.*

Keywords: Political Education, First-Time Voters, and Elections

Pendahuluan

Kualitas implementasi demokrasi dalam suatu negara sangat bergantung pada kapabilitas serta tingkat kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum; jika lembaga tersebut tidak bermutu, maka praktik demokrasi akan terpengaruh. Sebuah tolok ukur signifikan bagi kesuksesan pemilihan umum yang dapat diukur secara kuantitatif adalah angka partisipasi pemilih; dalam kaitan ini, Indeks Demokrasi yang

dirilis oleh The Economist Intelligence Unit menggariskan bahwa persentase pemilih yang secara konsisten mencapai 70 persen dalam kontestasi elektoral tingkat nasional dianggap sebagai standar ideal untuk partisipasi politik (Kekic, 2007). Berdasarkan parameter tersebut, Indonesia masih terkategori dalam zona "aman". Lebih lanjut, apabila dilakukan perbandingan dengan empat negara lain di kawasan Asia Tenggara, angka partisipasi pemilih di Indonesia pernah

tercatat sebesar 36,9 persen, sementara Malaysia menunjukkan angka 51,8 persen (Schraufnagel et al., 2014). Sehubungan dengan tantangan berikutnya, yaitu upaya menjamin implementasi nilai-nilai profesionalisme dan integritas, KPU memiliki kewajiban untuk selalu berpedoman secara ketat pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Regulasi yang mengatur pemilihan umum di Indonesia kerap kali memunculkan problematika tersendiri, mulai dari adanya kevakuman norma hingga lahirnya ketentuan-ketentuan yang bersifat kontradiktif dan ambigu, yang pada akhirnya menyulitkan KPU dalam tataran pelaksanaannya. Situasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa legislasi terkait pemilu merupakan hasil dari proses politik, yang inheren dengan berbagai kepentingan dari para aktor yang terlibat dalam perumusan dan pengesahannya. Adanya batasan waktu juga turut berkontribusi terhadap timbulnya berbagai kekurangan dalam produk hukum tersebut. Ujungnya, kevakuman hukum ataupun pertentangan antar regulasi ini berpotensi mengganggu kelancaran proses penyelenggaraan atau bahkan mencederai profesionalisme lembaga penyelenggara pemilu. Rintangan ketiga bersumber dari

adanya berbagai manuver kepentingan politik yang berupaya memengaruhi KPU agar menerbitkan kebijakan-kebijakan yang memberikan keuntungan bagi faksi-faksi spesifik. Keadaan semacam ini berisiko mengikis prinsip "keadilan" dalam pemilihan umum, yang semestinya menjamin adanya "kesetaraan arena kompetisi" (*the same level of playing field*) untuk seluruh kontestan pemilu beserta para pemilih. Lebih jauh lagi, apabila KPU kehilangan keteguhannya dan mengabaikan prinsip kemandirian, maka berbagai kebijakan yang diambil KPU di masa mendatang sangat rentan terhadap hilangnya kepercayaan publik, dan konsekuensinya, legitimasi hasil pemilu dapat dengan mudah digugat oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan (KPU, 2017). Bertolak dari elaborasi sebelumnya, peneliti berpandangan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh eksistensi Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang beroperasi secara bebas, rahasia, jujur, adil, dan independen, serta tidak dapat dipisahkan dari angka partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilih mereka. Kelompok pemilih usia muda acapkali kurang memantau dinamika politik nasional, yang berakibat pada keterbatasan pemahaman mereka; kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka

akan mudah terpengaruh, mengingat stabilitas emosi mereka yang masih berkembang. Fenomena tingginya angka golongan putih (golput) dalam pemilihan umum saat ini juga merupakan fakta yang tidak terbantahkan, di mana salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya mutu edukasi politik yang diterima oleh pemilih pemula, sehingga pemahaman mereka mengenai isu-isu politik menjadi dangkal. Salah satu manifestasi konkret dari edukasi politik yang intensitasnya relatif mudah diukur adalah melalui partisipasi politik, misalnya keterlibatan pemilih muda dalam ajang pemilihan umum. Generasi pemilih muda ini merepresentasikan kohort pemilih baru yang mempunyai karakteristik, latar belakang sosial, pengalaman hidup, serta tantangan yang distingtif jika dibandingkan dengan generasi pemilih terdahulu.

Khusus di wilayah Kabupaten Aimas, terlihat adanya kecenderungan penurunan angka partisipasi publik dalam pemilihan umum. Sebagai ilustrasi, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 di Kabupaten Sorong, khususnya di Kecamatan Aimas, data hasil rekapitulasi formulir C1 dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) menunjukkan bahwa dari total 70 TPS, data yang berhasil terkumpul berasal dari 47

TPS, atau setara dengan 67,14%. Dari jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 20.214 jiwa, hanya 9.630 jiwa yang menggunakan hak pilihnya. Angka ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya hanya mencapai 47,6%, sementara sisanya, sebesar 52,4%, merupakan kelompok yang tidak memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya (KPU RI, 2017). Mengamati tren penurunan angka partisipasi politik dalam kontestasi elektoral di Kabupaten Sorong (Aimas), menjadi penting bagi para pemangku kepentingan untuk menggalakkan upaya pendidikan politik secara lebih intensif dan meluas. Berbagai institusi seperti lembaga pendidikan formal (sekolah), organisasi partai politik, media massa, serta entitas lainnya diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kontribusi mereka dalam menyelenggarakan program edukasi politik bagi segenap lapisan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong sendiri sejauh ini telah secara aktif menginisiasi berbagai program pendidikan politik yang dirancang secara spesifik untuk menyasar segmen pemilih pemula. Dari sudut pandang keilmuan, berbagai kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sorong dapat dianalisis dan dibandingkan dengan beragam kerangka konseptual

pendidikan politik yang telah dirumuskan oleh para pakar di bidangnya. Dengan demikian, terbuka ruang untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap aspek konseptual maupun implementatif dari program pendidikan politik yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sorong hingga saat ini. Bertitik tolak dari konteks permasalahan yang telah diuraikan, penelitian mengenai kontribusi KPU Kabupaten Sorong dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi pemilih pemula sebagai persiapan menyambut Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Sorong menjadi sebuah topik studi yang relevan dan menarik untuk dieksplorasi lebih jauh.

Pertama, Maria Desti Rita (2016) dalam penelitian berjudul "Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan Umum Kepala Daerah kepada penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan KPU dalam hal pemberian informasi, penyediaan aksesibilitas, dan upaya peningkatan partisipasi pemilih di kalangan penyandang disabilitas, dengan merujuk pada PKPU No 5 Tahun 2015. Kesamaan penelitian tersebut dengan studi yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada fokusnya terhadap peran

KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih; sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya. Hasil yang ditemukan dalam penelitian Maria Desti Rita (2016) menunjukkan bahwa KPU telah melakukan pemberian informasi melalui iklan layanan masyarakat, sosialisasi tatap muka, penyediaan jasa interpreter, dan simulasi yang dilakukan sekali dan hanya melibatkan anggota penyandang disabilitas. Sebagai hasilnya, partisipasi pemilih penyandang disabilitas mengalami peningkatan sebesar 8%, yaitu menjadi 66% dari yang sebelumnya hanya 58% pada tahun 2010.

Kedua, Muhammad Adeputera Hermas (2019) melalui penelitian berjudul "Peran komisi pemilihan Umum dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal". Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi pemilih pemula serta dalam meningkatkan tingkat partisipasi mereka pada Pilkada tahun 2015. Perbedaan penelitian ini dengan studi yang sedang dilakukan adalah bahwa penelitian tersebut secara spesifik mengkaji bagaimana pendidikan politik dilaksanakan

oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Kendal. Sementara itu, penelitian saat ini lebih menitikberatkan pada analisis peranan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula, serta mengidentifikasi faktor-faktor kendala dan pendukung dalam pelaksanaan pendidikan politik tersebut guna menyongsong Pemilu 2024. Hasil yang ditemukan dalam penelitian Muhammad Adeputera Hermas (2019) menunjukkan bahwa KPU mendapatkan respons positif dari masyarakat, khususnya dari kalangan pemilih pemula, yang menunjukkan antusiasme yang tinggi.

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian dapat memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu masalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data

dilakukan secara Triangulasi (Gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara terperinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. (Sugiyono (2016:9). Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan tentang peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula Guna Menyongsong Pemilu 2024.

Pembahasan

Pada bagian ini, akan disajikan paparan mengenai temuan-temuan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Penyajian hasil penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga tema utama. Tema pertama membahas mengenai Peranan KPU Kabupaten Sorong dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sorong. Bagian pertama ini akan lebih mendalam mengungkap justifikasi atau alasan KPU menyelenggarakan pendidikan politik dan menetapkan pemilih pemula sebagai target utama program pendidikan politik tersebut. Selain itu, akan dipaparkan pula mengenai berbagai program yang diimplementasikan oleh KPU dalam pelaksanaan program pendidikan politik. Tema kedua berfokus pada Faktor Pendukung KPU Kabupaten

Sorong dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sorong. Pada bagian kedua ini, akan diuraikan berbagai faktor yang memberikan kontribusi positif atau mendukung KPU Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan program pendidikan politik yang ditujukan bagi pemilih pemula di wilayah tersebut. Tema ketiga mengulas mengenai Faktor Penghambat KPU Kabupaten Sorong dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sorong. Pada bagian ketiga ini, akan dipaparkan secara rinci mengenai berbagai faktor yang menjadi kendala atau menghambat KPU Kabupaten Sorong dalam implementasi program pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sorong. Berikut ini akan disajikan paparan lebih lanjut mengenai ketiga tema tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebuah institusi pendukung negara yang memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu, KPU mengemban tugas untuk melakukan sosialisasi politik. Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi mengenai tahapan-tahapan pemilu dan profil calon-calon peserta pemilu, tetapi juga mencakup sosialisasi yang berorientasi

pada pendidikan politik. Salah satu unit KPU di tingkat daerah yang aktif menyelenggarakan program pendidikan politik adalah KPU Kabupaten Sorong. Terdapat beberapa justifikasi yang dikemukakan oleh pihak KPU Kabupaten Sorong terkait dengan pelaksanaan pendidikan politik. Untuk menggali lebih dalam mengenai latar belakang KPU Kabupaten Sorong melaksanakan program pendidikan politik, peneliti melakukan sesi wawancara dengan YK (Kepala Divisi SDM dan Parmas) dan AS (Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan). Berikut adalah deskripsi hasil wawancara yang berhasil dihimpun oleh peneliti.

Latar belakang KPU Kabupaten Sorong menyelenggarakan Pendidikan politik, menurut YK, adalah sebagai berikut: *"KPU melakukan Pendidikan politik karena ini merupakan kewajiban kami sebagai penyelenggara pemilu dan juga Amanat dari undang-undang yaitu amanat untuk melaksanakan sosialisasi. Sehingga Pendidikan politik itu dapat dipahami oleh kalangan pemilih terkhususnya pemilih pemula" (Wawancara, 22 September 2023).*

Masyarakat tidak hanya memerlukan pencerahan terkait aspek teknis pelaksanaan pemilu, tetapi juga perlu ditingkatkan kecerdasannya dalam memahami isu-isu

substantif melalui program pendidikan pemilih. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memahami substansi dari pemilu itu sendiri, yakni bagaimana pemilu dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan mengemban amanah memimpin bangsa dan negara. Oleh karena itu, masyarakat perlu diarahkan untuk memilih pemimpin yang berkualitas, yaitu mereka yang memiliki kapabilitas dan memahami kebutuhan riil Masyarakat. Alasan mengapa pemilih pemula dijadikan target dalam program pendidikan politik, menurut AS (Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan), adalah: *"karena pendidikan politik dapat meningkatkan pengetahuan serta memaksimalkan partisipasi aktif Masyarakat dalam berpolitik dan juga jumlah pemilih pemula cukup besar dalam daftar DPT di Kabupaten Sorong. (Wawancara, 21 September 2023)."*

Dengan kuantitas yang signifikan, diharapkan pemilih pemula tidak bersikap apatis atau tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Selain itu, pemilih pemula juga perlu dibimbing agar menjadi pemilih yang cerdas, yang menentukan pilihannya berdasarkan visi dan misi para calon. Di samping itu, pemilihan pemilih pemula sebagai target juga didasarkan pada pertimbangan bahwa jumlah mereka yang

cukup besar, serta kondisi di mana pemilih pemula selama ini seringkali hanya dijadikan sebagai objek politik, bukan sebagai subjek politik yang perlu ditingkatkan kesadaran dan pemahamannya. AS juga menambahkan bahwa: *"pemilih pemula dijadikan target program pendidikan politik itu karena pemilih pemula yang baru ikut dan belum memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup mengenai pemilu/pemilihan" (Wawancara, 21 September 2023)."*

Dengan demikian, menjadi penting untuk membentuk pola pikir atau paradigma politik pemilih pemula agar mereka terhindar dari berbagai residu negatif dalam politik, seperti praktik politik uang (*money politic*) dan kampanye hitam. Dari kedua pandangan tersebut, tampak jelas bahwa alasan fundamental pemilihan pemilih pemula sebagai sasaran program pendidikan politik adalah untuk mengupayakan agar mereka menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas adalah mereka yang menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasionalitas, seperti memilih berdasarkan visi dan misi calon. Selain itu, hal ini juga dilatarbelakangi oleh alasan yang bersifat proyektif dan preventif, yaitu untuk membentuk pola pikir pemilih pemula. Pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya diproyeksikan agar tidak terpengaruh oleh

residu-residu politik yang merusak, seperti politik uang dan praktik kampanye hitam. KPU Kabupaten Sorong, dalam melaksanakan program pendidikan politik, memiliki lingkup tugas yang serupa dengan agen-agen lain yang juga menyelenggarakan pendidikan politik; namun, KPU Kabupaten Sorong lebih memfokuskan upayanya pada pendidikan pemilih yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemilu dan bagaimana masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara tepat.

KPU Kabupaten Sorong dalam menjalankan fungsi sosialisasi politiknya menggunakan dua pendekatan utama, yaitu melalui sosialisasi yang disebarkan melalui berbagai media dan melalui kegiatan pendidikan politik secara langsung. Sosialisasi secara umum dilakukan dengan memanfaatkan beragam media, seperti pemasangan baliho atau spanduk yang berisi ajakan untuk berpartisipasi dalam pemilu dan informasi mengenai tahapan pemilu, serta melalui publikasi di media cetak dan elektronik. Di media elektronik, sosialisasi dilakukan dalam format *talkshow* di stasiun radio dan televisi yang membahas tahapan pemilu dan pentingnya menjadi pemilih yang berkualitas atau cerdas. Sementara itu, sosialisasi yang diimplementasikan dalam bentuk pendidikan politik dilaksanakan

melalui kegiatan *workshop* serta penyelenggaraan lomba penulisan esai dan debat siswa, yang merupakan bagian dari program pendidikan politik yang ditujukan bagi pemilih pemula. KPU menyelenggarakan program *workshop* dan lomba penulisan esai serta debat Siswa yang secara khusus menargetkan perwakilan siswa-siswa dari SMA/SMK sederajat di wilayah Kabupaten Sorong.

Untuk lebih jelasnya, program-program yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong dalam rangka pendidikan politik bagi pemilih pemula adalah sebagai berikut: Peran KPU Kabupaten Sorong dalam mensosialisasikan kegiatan Pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Sebagaimana yang diungkapkan Oleh AS bahwa : "*tujuan dilaksanakannya pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan umum*". (Wawancara, 21 September 2023) Tujuan dari sosialisasi politik tidak terlepas dari proses penyadaran masyarakat dan Sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik. tujuan dari sosialisasi adalah untuk membentuk dan

menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Pendidikan politik menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya demokratis di masyarakat. Pendidikan politik memang tugas seluruh masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan keluarga. YK juga menambahkan bahwa *"kami melakukan sosialisasi bukan hanya di sekolah menengah atas. tetapi beberapa bulan setelah dilantik, Kpu Kabupaten sorong juga melakukan sosilisasi pendidikan politik pemilih pemula di Kampus Unimuda Sorong".* **(Wawancara , 21 September 2023)**

Alat peraga yang dilakukan KPU yaitu Baliho, Poster, Pamflet, Pin, Spanduk, Stiker Pada Mobil/Motor/Rumah. Sosialisasi ini dilakukan dengan menayangkan iklan tentang tata cara pemilihan yang baik dan benar serta ajakan untuk menggunakan hak memilih yang ditayangkan di televisi lokal yang ada di Sulawesi Selatan Kota makassar. Hal ini dapat juga dilihat dengandisebarkan baliho yang tergantung di tempat strategis serta stiker yang disebar dirumah seperti disamping jalan raya yang ramai dilalui oleh masyarakat, kantor camat, kantor, lurah/desa dan posko pemenangan calon. Sebagaimana diungkapkan oleh YK bahwa: *"ada beberapa hal yang terus kami upayakan untuk menarik simpatik dan meningkatkan partisipasi*

masyarakat untuk memilih yakni sosialisasi politik melalui penyebaran informasi melalui alat peraga. Sejauh ini penyebaran infomasi melalui alat-alat peraga sangat membantu kinerja KPU dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat terutama baliho, stiker dan sejenisnya. " **(Wawancara 22 September 2023).**

KPU Kabupaten Sorong membuat ini semua untuk menarik minat pemilih untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden. Dalam alat peraga ini terdapat ajakan, jadwal pemilihan, tata cara mencoblos, alur pemilihan, dan foto calon dan wakil presiden. Cara ini dilakukan agar masyarakat tidak bingung dalam memilih dan menentukan pilihan. Media merupakan lembaga yang bertanggung jawab memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, adil, transparan, dan profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh YK yang mengungkapkan bahwa: *"sejauh ini media sebagai lembaga yang independen sangat berperan penting dalam pencerdasan dan pencerahan politik bagi masyarakat dan melalui media televisi KPU bisa memberikan gambaran umum secara visual dan juga memanfaatkan media sosial seperti youtube, tiktok, Instagram dan facebook sangat*

membantu kami melakukan sosialisasi dengan demikian Masyarakat juga memiliki pengetahuan terkait pemilu". (Wawancara, 21 September 2023)

Melalui pemberitaan yang dilakukan oleh media massa, masyarakat akan memperoleh gambaran umum terkait penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong melakukan sosialisasi melalui media massa baik itu dalam bentuk iklan dan penyampaian atau pemberitahuan atau wacana melalui media massa dan media sosial agar masyarakat Kabupaten Sorong memiliki pengetahuan dan lebih mengenal calon pemimpin mereka.

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas- luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Sebagaimana diungkapkan oleh YK yang mengungkapkan bahwa. *"KPU membentuk relawan demokrasi untuk membantu orang-orang kami sebagai penyelenggara dalam*

melakukan sosialisasi kemasyarakat di tiap-tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Sorong. Tugas relawan demokrasi yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum dan juga memberikan petunjuk tentang tata cara mencoblos yang baik dan benar. " (Wawancara, 22 September 2023). Pro Relawan Demokrasi yang digagas KPU Kabupaten Sorong melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis . KPU Kabupaten Sorong membuat Program Relawan Demokrasi sebagai salah satu bentuk dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal. Selain itu juga mampu menumbuhkan Kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu dapat lebih baik dibandingkan pemilu- pemilu sebelumnya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sorong dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu melalui workshop. Hal itu dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan Pemilu dan teknis pencoblosan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh NF bahwa: *"Workshop ini dilakukan guna untuk memberikan pemahaman mengenai demokrasi, pelaksanaan pemilu dan teknis pencoblosan kepada para pemilih pemula di Kabupaten sorong"*. (Wawancara, 21 september 2023). KPU Kabupaten Sorong dalam mensosialisasikan pendidikan politik bagi pemilih pemula melaksanakan suatu workshop yang membahas mengenai bagaimana pelaksanaan demokrasi dan pemilu yang baik. Bagaimana menggunakan hak pilih dan memilih calon pemimpin yang baik Hal itu dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan Pemilu kepada pemilih pemula agar pada pesta demokrasi dapat menggunakan hak pilih.

Dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di kabupaten Sorong KPU di dukung Oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Telah dilakukan Oleh teman komisioner KPU lama sebagaimana yang

diungkapkan oleh YK pada saat wawancara bahwa : *"salah satu hal yang mendukung pelaksanaan Pendidikan politik itu karena adanya sumber daya manusia di KPU Kabupaten Sorong yang cukup memadai dengan menggunakan prinsip kolektif kolegial"*. (wawancara 22 september 2023).

Salah satu faktor Yang mendukung pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih pemula yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sorong adalah Sumber daya manusia yang dimiliki Oleh KPU Kabupaten yang cukup memadai dan terampil sehingga dalam pelaksanaan program pendidikan politik dapat berjalan dengan baik. Selain itu adanya prinsip kolektif kolegial sehingga para Anggota Komisioner KPU Kabupaten Sorong dalam melaksanakan program pendidikan politik bagi pemilih pemula dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur pelaksanaan.

2. Telah dilaksanakan Oleh Komisioner KPU lama Sebagaimana yang disampaikan Oleh YK ialah : *"Salah satu factor yang mendukung pelaksanaan Pendidikan politik yaitu telah dilaksanakan Oleh komisioner yang lama karena pengurus Kpu yang baru sudah berada pada penghujung menjelang pemilu"*. Dalam melaksanakan Pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sorong mengalami hambatan atau

kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya :

- a) Sebagaimana diungkapkan oleh YK yang mengungkapkan bahwa *"letak goeografis menjadi factor penghambat KPU dikarenakan jalan antara lokasi sosiasliasi dan Tps kurang dapat dijangkau oleh Masyarakat. (Wawancara 22 September 2023)*
- b) Anggaran yang masih kurang dari pemerintah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh YK bahwa : *"faktor penghambat pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Sorong adalah pada saat melakukan sosialisasi atau pada saat sosialisasi berlangsung yakni kurangnya dana untuk melaksanakan sosialisasi. " (Wawancara, 22 September 2023).*

Kesimpulan

Dari paparan hasil penelitian, dapat ditarik sebuah pembahasan analitis yang mendalam. Peran KPU Kabupaten Sorong dalam konteks ini jelas melampaui tugas administratifnya sebagai penyelenggara pemilu. Mereka secara aktif mengambil peran sebagai arsitek

modal sosial, yang berupaya membangun fondasi demokrasi yang lebih kuat melalui pendidikan politik. Peran KPU Kabupaten Sorong dalam konteks ini jelas melampaui tugas administratifnya sebagai penyelenggara pemilu. Mereka secara aktif mengambil peran sebagai arsitek modal sosial, yang berupaya membangun fondasi demokrasi yang lebih kuat melalui pendidikan politik. Fungsi sosialisasi yang diamanatkan UU No. 7 Tahun 2017 diterjemahkan menjadi sebuah strategi multifaset yang dirancang untuk menjangkau pemilih pemula dari berbagai sudut. Strategi yang diterapkan menunjukkan pemahaman yang matang terhadap lanskap komunikasi modern. Penggunaan media massa dan alat peraga berfungsi sebagai "serangan udara" untuk menjangkau audiens luas, sementara pendekatan *workshop* dan *road to school* menjadi "serangan darat" yang bersifat personal dan mendalam.

Daftar Pustaka

- Ardiyanto Juri, ddk (2017). Inovasi Pemilu Mengatasi Tantangan, memanfaatkan peluang. Jakarta:Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hlm 2-122
- Dr,EkoHandoyo,M.Si.& Puji Lestari,S.Pd,M.Si.Pendidikan Politik :

- Yogyakarta, Oktober 2-17 cetakan pertama, Hlm 1-6
- Fuadi, F (2016). Pertentangan Pengaturan Pemilihan Anggota Komisi Independen Pemilihan di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 608-699
- Haryant. Sosialisasi Politik (Suatu pemahaman awal) : Yogyakarta, Mei 2018 cetakan I Hlm 34.
- Perdana, Aditya, dkk (2019) Tata Kelola Pemilu Di Indonesia. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hlm 129-132
- Sasangka, I., & Zulkarnaen, Wandy. Pengembangan Modal Seleksi Dalam Upaya Membentuk Integritas & Independensi Anggota Kpu Kabupaten/Kota. *Jurnal Ilmiah MFA (Manajemen, Ekonomi, & Akutansi)*, 2019, 3. 1 : 95-115
- Siregar, R. S., Saputro, A. N. C., Saftari, M., Panggabean, N. H., Simarmaata, J. Kholifah, N. & Harianja, J. K. (2022). Konsep Dasar Ilmu Pendidikan . Yayasan Kita Menulis
- Sugiyono 2013, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D. (Bandung, ALFABETA)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D : Bansung Oktober 2016, Cetakan
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Sukarno, B. (2011). Pendidikan Politik dalam demokrasi. Widya Wacana : Jurnal Ilmiah, 7(1)
- Sumanto, D., & Haryanti, A. (2021), Pendidikan Politik
- Sumanto., D., & Haryanti., A. (2021). Pendidikan Politik
- Susilastu DN, S. D., Soeprapto, A., & Suparno, B. A (2015), Relawan Demokrasi Sebagai komunikator Politik Bagi Pemilih Pemula
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Winkel, W. (2020). *Psikologi pendidikan*. Gramedia.
- Yusuf, A., & Nurdiansyah, R. (2020). Penerapan strategi pembelajaran aktif dalam PPKn. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 15(2), 101–110.